

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia merupakan salah satu konsekuensi logis bagi negara yang sedang berkembang. Artinya bahwa pembangunan dianggap sebagai suatu kebutuhan yang paling mendasar di pemerintahan Indonesia. Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah akan dapat berjalan dengan lancar jika di lakukan bersama oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali, serta terarah sehingga dapat tercapai tujuan Nasional. Tujuan Nasional sebagaimana yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan, visi, misi dan arah pembangunan Nasional.

Salah satu komponen pembangunan Nasional adalah pembangunan Daerah Kabupaten yang merupakan bagian dari pembangunan Nasional, pembangunan Kabupaten merupakan upaya yang sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dengan segenap kemampuannya untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten dan upaya perbaikan, pertumbuhan masyarakat dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai pembangunan tersebut

maka di perlukan Aparatur Sipil Negara. Adapun yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok kepegawaian, dimana dalam peraturan tentang Pegawai Negeri telah di gantikan dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang :

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

Kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara sebagai pelaksana pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri diperlukan efektivitas kerja pegawai yang memadai dan aturan yang berlaku.

Pemerintah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya.

Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras.

Adapun yang dimaksud dengan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat (2) tentang pemerintahan daerah sebagai berikut :

“Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonom dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan penjelasan diatas, salah satu komponen pembangunan Nasional adalah pembangunan Daerah terutama di Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional. Pembangunan wilayah merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dengan segenap kemampuannya untuk melaksanakan upaya perbaikan dan pertumbuhan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan peran pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu peran yang diharapkan dapat mendukung upaya tersebut adalah optimalisasi peran pemerintahan Kabupaten Cirebon terutama Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan Efektivitas kerja pegawai.

Berdasarkan hal tersebut maka, pelaksanaan pengawasan merupakan unsur penting dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai, oleh karena itu perlu adanya pengawasan demi terciptanya disiplin pegawai dan menghindari kesalahan penyimpangan dan kegagalan.

Pengawasan adalah proses pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian,2015:176).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan pengawasan merupakan suatu kegiatan positif, dimana dalam pengawasan terdapat tindakan-tindakan yang dapat mengarahkan semua kegiatan ke arah standar yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah, melainkan untuk memahami apa yang salah dan mengoptimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan semula.

Pentingnya pengawasan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon oleh sebab itu perlu adanya dukungan dari pegawai yang mempunyai efektivitas kerja yang maksimal. Untuk itu diperlukan efektivitas kerja pegawai.

Efektivitas kerja pegawai menurut Emerson dalam Handayani (2000:16)

“ efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Pada penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan yang efektif adalah pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Pencapaian peningkatan efektivitas kerja pegawai terlebih dahulu dengan menciptakan efektivitas secara individu, kemudian efektivitas kerja secara kelompok dan dengan demikian akan tercipta efektivitas kerja secara sistem.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah penulis lakukan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, di temukan data yang berkaitan dengan pengawasan oleh Kepala Dinas dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai yang belum optimal, terlihat dari :

1. Sarana dan prasarana yang belum optimal yaitu terlihat dari penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu yang telah di tentukan. Hal tersebut di pengaruhi karena fasilitas kerja kurang memadai terlihat dari kurang nya sarana kerja yang di miliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
2. Masih kurang nya peran pengawasan Kepala Dinas dalam hal ini terlihat dari sering tidak adanya pimpinan di kantor dan sering di luar kantor dengan kesibukan pekerjaan. Sehingga dalam pelaksanaan nya pun belum optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon dengan mengambil judul penelitian “ **Pengawasan Oleh Kepala Dinas Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon**”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis mengemukakan rumusan masalah (*problem statement*) sebagai berikut: “ Pengawasan Oleh Kepala Dinas Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon masih belum optimal”.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, Penulis merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan (*problem question*), yaitu :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan kepala Dinas dalam meningkatkan Efektivitas kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana efektivitas kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon?
3. Faktor-faktor penghambat Pengawasan Oleh Kepala Dinas dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon?
4. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam Pengawasan Oleh Kepala Dinas dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dalam meningkatkan Efektivitas kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.

3. Untuk mengetahui Faktor penghambat pengawasan oleh Kepala Dinas dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
4. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pengawasan Oleh Kepala Dinas dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon?

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengawasan yang telah intens sehingga menimbulkan efektivitas kerja pegawai yang efektif dan yang lebih bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing dan mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengubah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya tentang pengawasan dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis tentang pengawasan oleh Kepala Dinas dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
- b. Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Pengawasan sebagian salah satu fungsi manajemen dituntut untuk selalu ada dalam setiap organisasi. Karena dengan berjalannya pengawasan secara baik dan benar, tidaknya dapat meminimalisir, mencegah bahkan dapat menghilangkan penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan dan mengganggu pencapaian tujuan organisasi.

Definisi pengawasan di kemukakan oleh para ahli secara berbeda-beda. Pengertian pengawasan menurut Sondang P. Siagian (2015:176) adalah “pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Menurut Victor M. Situmorang (2015:176) pengawasan adalah “setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang di laksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak di capai”

Pengawasan dalam suatu organisasi mutlak dilaksanakan oleh pemimpin baik tingkat atas, menengah dan bawah untuk mengarahkan bawahannya dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan sangat penting untuk mencapai efektivitas kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten agar para pegawai patuh dan taat kepada peraturan maupun perintah pimpinan yang berlaku dan ketentuan yang disertai tanggung jawab. Agar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap efektivitas

kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dapat berjalan dengan baik, maka harus menentukan fase-fase pelaksanaan diantaranya proses langkah-langkah pengawasan menurut M.Manullang dalam buku Dasar-dasar manajemen (2018:184) yaitu :

1. Menetapkan alat pengukur (*Standar*)

Bila kita bermaksud mengukur atau menilai sesuatu, maka tugas itu baru dapat dilaksanakan bilamana kita mempunyai alat pengukur sesuatu itu. Demikian juga halnya, bila kita mau mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan bawahan, kita harus mempunyai alat penilai, alat pengukur atau standar. Dalam garis besarnya jenis-jenis standar itu dapat kita golongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Standar dalam bentuk fisik
- b. Standar dalam bentuk uang

2. Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (*standar*) yang sudah ditentukan. Dengan demikian, jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal yang harus tersedia, yaitu standar atau alat pengukur dan actual result atau hasil kerja bawahan. Pekerjaan bawahan dapat diketahui melalui berbagai cara, yakni:

- a. Laporan tertulis
- b. Laporan lisan

3. Pengambilan Tindakan perbaikan (*corrective action*)

Fase terakhir ini hanya dilaksanakan, bila pada fase sebelumnya, dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka langkah-langkah dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan dengan standar-standar, penilaian dan pengambilan perbaikan.

Berdasarkan pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu bagian penting dalam organisasi, dimana pimpinan ingin mengetahui hasil-hasil pelaksana kerja dan apabila terjadi penyimpangan dapat segera diperbaiki. Sehingga organisasi selalu berada pada jalur yang di tetapkan sebelumnya. Salah satu tujuan dari pengawasan adalah meningkatkan efektivitas kerja pegawai . Oleh sebab itu, seorang pegawai negeri dituntut memiliki mental yang baik serta bersedia melaksanakan tugasnya demi kepentingan organisasi dan juga adanya kesadaran mengabdikan yang tinggi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan sangat membantu dalam penyelenggaraan pengawasan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai yang baik dalam pencapaian tujuan atau sasaran di dalam organisasi.

Dapat melakukan pengawasan maka dalam meningkatkan pekerjaan pegawai perlu dilakukannya efektivitas kerja pegawai dalam suatu instansi sehingga dapat menimbulkan suatu pekerjaan yang tercapai secara optimal. Berikut definisi yang memberikan definisi tentang efektivitas antara lain yaitu :

Pengertian mengenai efektivitas juga di kemukakan oleh Fremont E Kas (dalam Sugiyono:23) “Efektivitas ialah berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai”.

Efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi sebagaimana pendapat dari (Soedjadi 2009:37)

“Efektivitas (berhasil guna) yakni untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai waktu yang ditetapkan (target *achieved*, misalnya, angka produksi, ekspor, *income* bertambah, persentase lulusan suatu sekolah yang dikeluarkan bertambah dan lain – lain), namun target – target yang telah tercapai itu tentu saja harus dihubungkan dengan mutunya”.

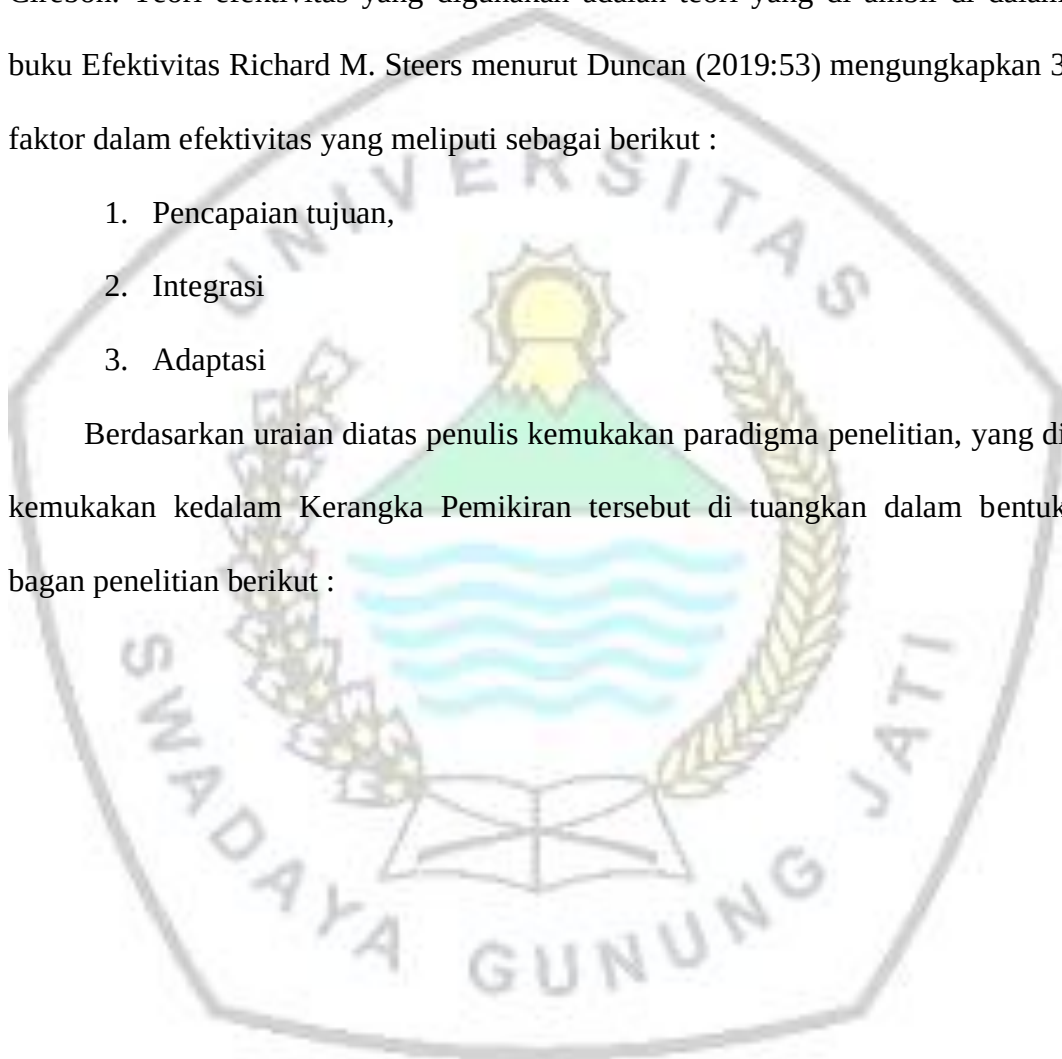
Kegiatan manajemen tidak akan berjalan dan tujuan tidak akan tercapai jika tidak disertai dengan sumber - sumber yang dibutuhkan untuk kegiatan manajemen yang mendukung seperti 6 M + 1 I : *Man, Materials, Machines, Methods, Money, Market dan Information*.

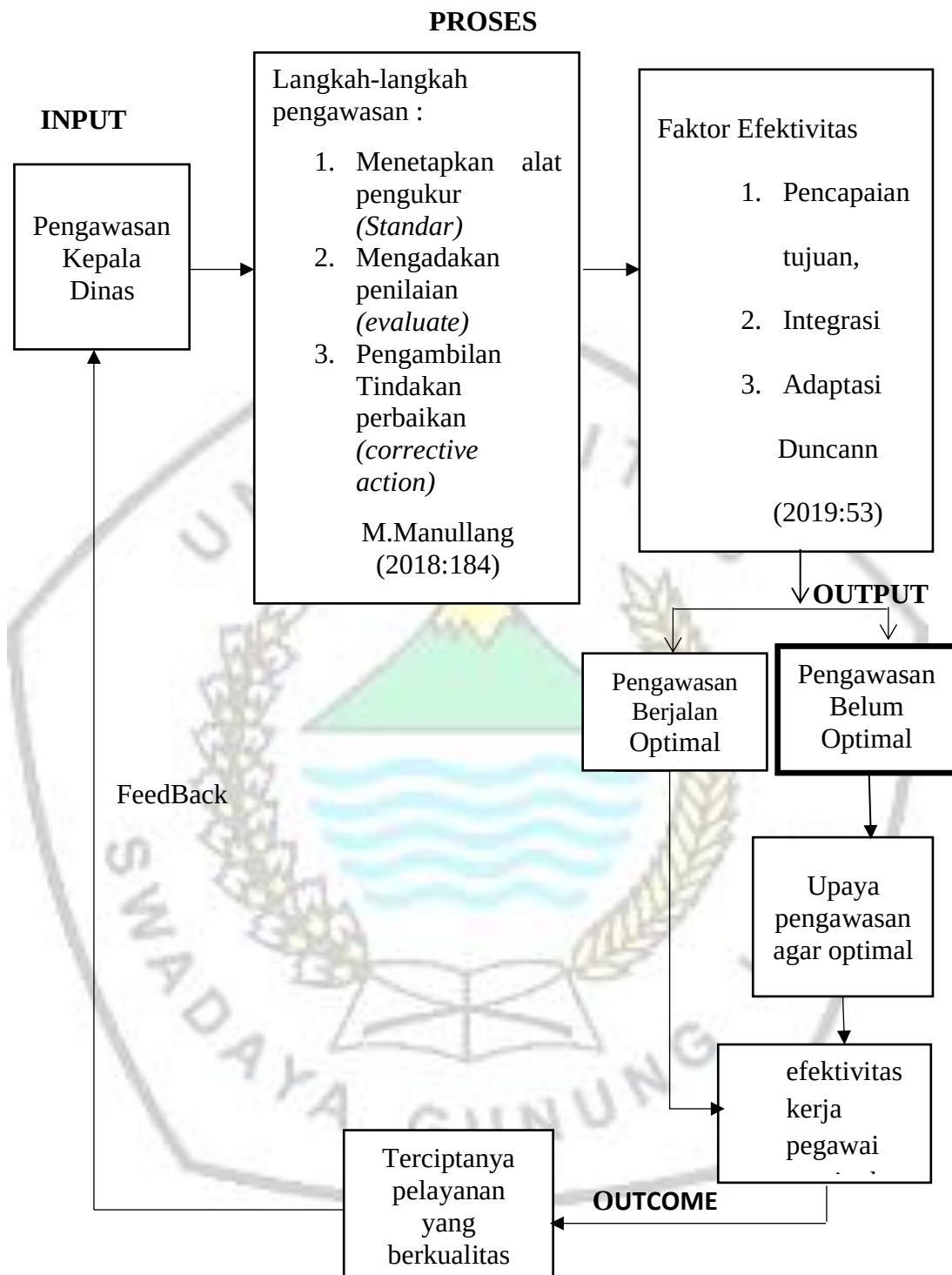
Dalam hasil kinerja atau untuk mengukur kinerja maka perlu adanya metode – metode yang tepat untuk mengukur kinerja maka perlu adanya metode – metode yang tepat untuk mencapai tujuan atau sasaran dan biasanya efektivitas menghasilkan barang – barang dan/atau jasa – jasa dengan satu cara yang tepat dan masyarakat menganggap sesuai atau sejauh mana tujuan itu tercapai.

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar tentang pengawasan dan efektivitas yang telah di paparkan diatas maka penulis mengemukakan ke dalam kerangka pemikiran tentang pengawasan yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon. Teori efektivitas yang digunakan adalah teori yang di ambil di dalam buku Efektivitas Richard M. Steers menurut Duncan (2019:53) mengungkapkan 3 faktor dalam efektivitas yang meliputi sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan,
2. Integrasi
3. Adaptasi

Berdasarkan uraian diatas penulis kemukakan paradigma penelitian, yang di kemukakan kedalam Kerangka Pemikiran tersebut di tuangkan dalam bentuk bagan penelitian berikut :





Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

1.7 Definisi dan Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan, maka dikemukakan definisi operasional seperti berikut :

Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas adalah suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana adalah efektif, tetapi belum tentu efisien suatu pekerjaan pemerintahan sekalipun, tidak efisien sebab mempunyai efek dan pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, social, dan sebagainya.

Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditetapkan., akhirnya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat bergantung pada bila mana tugas – tugas itu di selesaikan dan tidak terutama menjawab pertanyaan – pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan beberapa biaya yang di keluarkan untuk itu.

Pegawai DKP adalah seseorang yang bekerja pada suatu instansi, dimana dalam pekerjaannya berdasarkan perjanjian kerja dengan kesepakatan kerja untuk mencapai tujuan. Dinas Ketahanan Pangan (DKP) adalah Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru di Kabupaten Cirebon. Yang mengatur ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya.

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Tabel 1.1
Operasional Konsep Penelitian

KONSEP	DIMENSI	PARAMETER
Pengawasan M.Manullang (2018:184)	1. Menetapkan alat pengukur (<i>Standar</i>)	1. Standar dalam bentuk fisik 2. Standar dalam bentuk uang
	2. Mengadakan penilaian (<i>evaluate</i>)	1. Laporan tertulis 2. Laporan lisan
	3. Pengambilan Tindakan perbaikan (<i>corrective action</i>)	1. memberikan sanksi kepada bawahan 2. ketegasan sanksi pimpinan
Efektivitas Duncan (2019:53)	1. pencapaian tujuan	1. Ketepatan Waktu 2. Pencapaian sasaran
	2. Integritas	1. Kerjasama 2. Sosialisasi
	3. Adaptasi	1. Ketelitian dan kemampuan 2. Sarana dan Prasarana

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang digunakan

Menurut Sugiyono (2017:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah yang di gunakan untuk mendapat data dengan tujuan dan kegiatan tertentu.

“Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandaskan pada ciri – ciri ilmiah yang rasional empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara – cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah – langkah tertentu yang bersifat logis. Sugiyono,2017:2)

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif.

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2017:9)

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Pada penelitian kualitatif pemilihan informan tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang terpenting memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive (purposive Sampling)* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. (Sugiyono, 2017:216)

Yang artinya mencakup orang-orang yang di seleksi atas dasar kriteria yang di anggap mendukung penelitian. Adapun rincian informan sebagai berikut:

1. Informan Kunci (*Key Informan*) :
 - a. Kepala Dinas Di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
2. Informan Pendukung :
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon
 - b. Bagian pelaksana di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

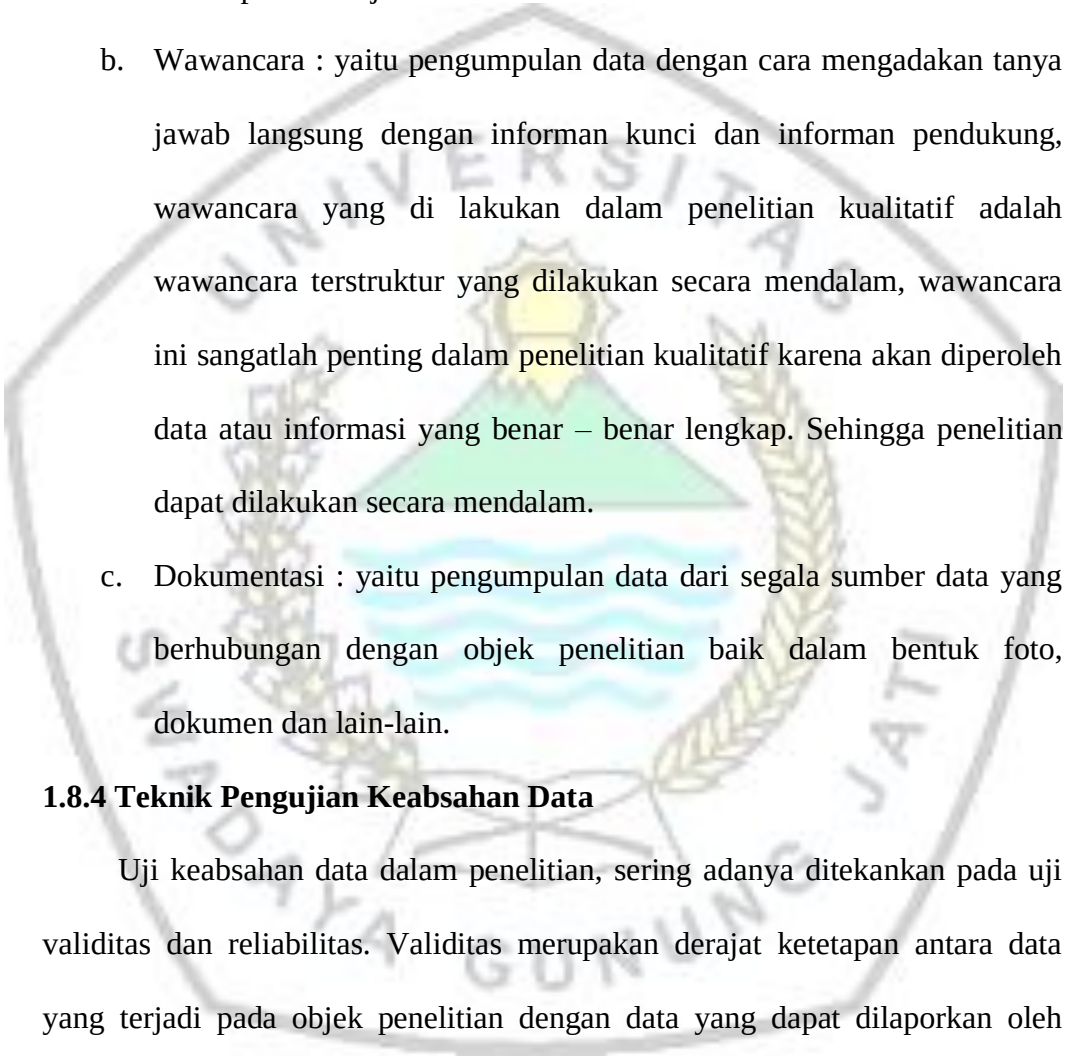
Teknik pengumpulan data yang di lakukan penulis meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dari sumber – sumber tertulis yaitu dari buku – buku, arsip, laporan dinas, monografi, surat kabar, internet dan sumber – sumber tertulis lain.

2. Studi Lapangan

Penulis mengamati langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan yang di lakukan oleh Pemimpin dalam meningkatkan efektivitas Kerja pegawai. Yang merupakan objek penelitian dan studi lapangan, yaitu :

- 
- a. Observasi : Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di lokasi penelitian. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan secara non partisipasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung tetapi tidak terlibat secara langsung dalam proses kerja.
 - b. Wawancara : yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan informan kunci dan informan pendukung, wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terstruktur yang dilakukan secara mendalam, wawancara ini sangatlah penting dalam penelitian kualitatif karena akan diperoleh data atau informasi yang benar – benar lengkap. Sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam.
 - c. Dokumentasi : yaitu pengumpulan data dari segala sumber data yang berhubungan dengan objek penelitian baik dalam bentuk foto, dokumen dan lain-lain.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering adanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data sesungguhnya. Terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini reliabilitas berkenaan dengan derajat konsisten dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2017:267).

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji credibility (*validitas internal*), transferability (*validitas eksternal*), dependability (*reability*) dan confirmability (*objektifitas*). (Sugiyono 2017:270)

Peneliti melakukan keabsahan data dengan melakukan teknik trigulasi. Wiersma (dalam Sugiyono, 2017:273), menyatakan : “*Triangulation is qualitative cross- validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures*”.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber – sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Alasan penulis melakukan teknik triangulasi adalah dengan teknik ini dapat menghilangkan perbedaan – perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu study sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Adapun cara yang digunakan dalam triangulasi ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan para informan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.

Pengecekan data dilakukan memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan valid, maka dilakukan validitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada informan yang berbeda terhadap data maupun informan dari hasil wawancara.

1.8.5 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah kegiatan mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2017:243) analisis data, ialah

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi data

Yaitu data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, dipilih dan dipilah-pilah, di rinci serta sistematis, kemudian memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Dan dengan kata lain reduksi data adalah memilih dan memilah data yang telah di peroleh. Data yang telah di reduksi diharapkan dapat memberikan deskripsi yang lebih tajam, sehingga memudahkan penelitian dalam melakukan analisis.

b. Display data

Yaitu pengajian dalam bentuk uraian, gambaran, tabel, dan sebagainya.

Display data ini hanya data yang relevan dengan fokus dan masalah penelitian yang disajikan.

c. Verifikasi Data

Yaitu peneliti berusaha memperoleh makna dari berbagai data yang di kumpulkan, kemudian di buat pola, model, tema, hubungan, persamaan terhadap hal-hal yang sering muncul.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jl. Sunan Drajat No. 18, Sumber, Kecamatan Sumber, Cirebon, Jawa Barat 45611 Telp (0231)321050 Kabupaten Cirebon. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya masalah yang perlu di pecahkan.
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian.
3. Lokasi penelitian yang terjangkau.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Penelitian di Dinas Ketahanan Pangan dilaksanakan pada selama lima bulan mulai dari Maret 2020 sampai Agustus 2020. Dan dapat dilihat pada jadwal penelitian sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

No	Tahun	2020																							
	Bulan	Maret		April				Mei				Juni				Juli				Agustus					
	Minggu	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
I	TAHAP PERSIAPAN																								
	1. Pengamatan																								
	2. Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																								
	3. Seminar Proposal																								
II	TAHAP PELAKSANAAN																								
	1. Penelitian																								
	2. Wawancara																								
	3. Penyusunan dan Bimbingan Draft Skripsi																								
III	TAHAP AKHIR																								
	1. Seminar Draft Skripsi																								
	2. Sidang Skripsi																								